

# STRATEGI KEAMANAN DALAM PARADIGMA REALIS

**Idjang Tjarsono**

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

## ABSTRAK

*Tulisan ini bertolak dari perspektif realis dalam usaha menjelaskan suatu strategi keamanan. Topik pembahasan mengarah kepada permasalahan; perang, konsep keamanan dan doktrin perang. Berdasarkan paradigma realis, penulis ingin melihat respon Amerika Serikat terhadap masalah keamanan dan terorism serta kondisi eskalasi keamanan dunia. Dalam melengkapi kajian tulisan ini penulis juga menggunakan perspektif alternatif yakni perspektif marxis dan neo marxis sebagai pelengkap. Hasil kajian memperlihatkan bahwa Paradigma realis dilihat sangat efektif dalam menyelesaikan masalah keamanan atau konflik dari sisi waktu tetapi tidak efektif dalam menyelesaikan inti masalah.*

**Keyword:**

## PENDAHULUAN

Tulisan ini lebih cenderung mengarah pada pembahasan tentang dasar-dasar epistemologis dalam usaha menjelaskan suatu fakta. Kecenderungan arah pembahasan ini, merujuk pada keinginan jurusan untuk membahas teori-teori Hubungan Internasional. Sekaligus sejalan dengan kebutuhan mahasiswa HI dalam memahami serta mengimplementasikan teori-teori HI dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, sewajarnya saya minta maaf seandainya tulisan ini kurang begitu menarik untuk kalangan tertentu. Secara jujur apa yang saya tulis dibawah ini bukan murni hasil pemikiran saya, karena pada dasarnya esensi tulisan dibawah ini merupakan hak paten faham realis, posisi saya sekedar menggunakan asumsi-asumsinya guna menjelaskan fakta. Bagi saya realism, adalah seperti apa yang saya rasakan, seperti apa yang saya alami (oleh lima indra), sehingga apa yang akan saya ungkapkan dibawah ini merupakan produk cara pandang realis menurut pemahaman saya. Dengan demikian pembahasan dibawah ini sekedar bunga rampai tentang asumsi-asumsi realis.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan; pertama, membahas konsep dan pendekatan, yang merujuk pada pemahaman realisme, dan kedua, menampilkan beberapa pendekatan realis yang digunakan Amerika Serikat (AS) dalam beberapa kasus, serta cara pandang realis dalam memahami fenomena dan ancaman globalisasi terhadap keamanan Negara. Ketiga, cara pandang realis melihat teori keamanan regional, dan masalah doktrin perang, serta analisa kritis



terhadap pandangan Marxis dan neo Marxis, tentang stabilitas keamanan Internasional.

## PEMBAHASAN

### 1. Konsep dan Pendekatan Strategi Keamanan

Strategi didefinisikan sebagai cara mencapai tujuan dengan kekuatan tersedia dalam lingkungan tertentu. Adapun dalam penerapannya dapat dengan menggunakan kekuatan militer untuk tujuan perang militer, menggunakan kekuatan militer dan non militer untuk tujuan perang militer. Dan dapat juga gabungan dari keduanya (Grand Strategy) untuk upaya pembangunan dan kesejahteraan.

Dalam hal ini, Collin mengemukakan tentang beberapa pendekatan strategi, yang bertolak dari asumsi bahwa kesenjangan antara tujuan dan sarana akan menimbulkan resiko. Pertama, *Sequential* yaitu menempatkan setiap langkah secara bertahap sampai tujuan akhir (merongrong, mengucilkan, memotong logistik, mengacaukan garis hubungan, barulah melakukan invasi). Pendekatan ini dilakukan jika dalam hal sarana tidak cukup besar, waktu dan sasaran tidak kritis. Kedua, Komulatif: menggunakan upaya secara serentak dengan sebanyak mungkin sarana tersedia dalam tempat waktu yang terbatas. Pendekatan ini dilakukan, jika sarana cukup, waktu dan sasaran kritis.

Disamping itu juga ada pendekatan yang disampaikan Clausewitz (pendekatan strategi langsung) yang lebih menekankan pada tahap operasional, antara lain ia mengatakan bahwa untuk memperoleh kemenangan, maka yang perlu diperhatikan adalah: sasaran pokok adalah kekuatan lawan, dan hanya dengan penghancuran militer saja kemenangan akan dicapai, dengan mematahkan semangat musuh lawan dan juga mengungguli kekuatan pokok lawan dengan kekuatan yang lebih besar.

Walaupun dampak pendekatan tersebut secara langsung dapat dirasakan pada masa Perang Dingin, dimana pola perlombaan persenjataan dunia dengan berkembangnya pelaksanaan strategi dengan tujuan tak terbatas yang mendorong kearah perang total. Namun bukan berarti hari ini pendekatan dan dampaknya sudah tidak kita rasakan, bagaimana kebijakan AS dalam menghadapi isu teroris, bagaimana munculnya fenomena bangkitnya tiga front keamanan dunia (Timur Tengah, Amerika Latin, Asia Pasifik) kesemuanya itu hanya sebgai kecil dari banyak fenomena dari pendekatan dan dampak dari pendekatan langsung sebagai anak kandung dari isme realis.

Selanjutnya bagaimana pandangan suatu negara dalam melihat kekuatan negara lain (National Power) dalam hal ini Klause Knor, menggunakan istilah "war potential of nation", yakni unsur yang dapat mendukung perang diluar angkatan perang. Dalam hal ini, angkatan perang identik dengan *strength* atau *ready force*, yang mana *strenght* atau *force* memberikan konotasi kepada fakta dan kondisi sehingga lebih bersifat teknis. Sedangkan *Power*, lebih memberikan konotasi kepada dampak dari *force* atau *strenght* dalam hubungannya dengan pihak luar, sehingga lebih bersifat politis.

Oleh karenanya, *National Power* mencakup secara kolektif *strenght* (force for war) dan potensial untuk perang (national potential for war) maupun kesejahteraan. Pemahaman ini terkait dengan penerapan strategi alternatif, yakni



jika potensi perang nasional tidak dipakai untuk keperluan perang (dalam kondisi damai) maka menjadi bagian terbesar dari kekuatan kesejahteraan nasional. Adapun menurut Klaus Knorr, *war potential of nation* adalah motivasi perang, kapasitas ekonomi dan kemampuan mengelola.

Dalam konteks negara berkembang masalah keamanan dan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan, disamping karena menyatunya perang dan konflik (yang dilaksanakan dengan violence dan coercion) juga masalah *survival* bangsa dan kualitas hidup dalam kondisi marginal. Maka munculah kata-kata: Perang terlalu penting untuk diserahkan semata-mata kepada para jendral, dan sebaliknya jendral tak dapat ditinggalkan dalam upaya kesejahteraan.

Realisme sebagai Landasan Politik Modern Hubungan antar Bangsa (Machiavelli, Thommas Hobbes, Morgenthau), menekankan pada asumsi-asumsi: Pertama, Politik diatur oleh hukum obyektif yang berakar pada sifat-sifat manusia itu sendiri. Kedua, Politik adalah konsep kepentingan dinyatakan dalam bentuk kekuasaan. Tiga, Konsep kepentingan tidak berarti dinyatakan dalam bentuk kekuasaan yang tetap dan sekali untuk selamanya. Keempat, Mengetahui akan pentingnya arti moral dari kegiatan politik. Kelima, Menolak identifikasi moral suatu negara tertentu dengan hukum moral yang menguasai alam semesta. Terakhir bahwa perbedaan politik dengan lain aliran nyata dan jelas.

## 2. Masalah Perang

Perang atau konflik akan makin bermasalah dalam kehidupan manusia karena dunia semakin sempit, perjalanan sejarah semakin cepat, penemuan dibidang militer, perkembangan demokrasi. Pandangan tentang perang secara umum ada dua yakni memolak dan menerima (relatif), tetapi dari segi manapun pandangan yang dipergunakan maka perang adalah merupakan bagian dari spectrum yang lebih besar, yakni: kondisi hukum yang abnormal, cara melaksanakan konflik, sikap kelompok yang ekstrim, dan cara-cara penggunaan kekerasan.

Perang adalah suatu kontak kekerasan dari kesatuan yang berbeda tetapi sejenis. *A Contending by force* (Cicero). Pendapat tentang Perang dan Konflik: Pertama, Perkembangan teknologi dan senjata perusak massal menjadikan kekerasan internasional kurang relevan dengan aspirasi manusia. Kedua Penyebaran kegiatan yang bersifat transnasional menjadikan batas negara menjadi kurang penting lagi. Ketiga, Masalah dalam dan luar negeri menjadi lebih kabur akan memperlemah ketentuan mengenai kedaulatan negara nasional.

Selanjutnya bagaimana realis berpendapat tentang perang dan konflik, bahwa: Selama sistem internasional masih didasarkan atas negara-negara nasional yang secara militer berdaulat, maka kekerasan tetap akan dipergunakan dalam menyelesaikan konflik internasional. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka pertimbangan keamanan akan tetap dipakai sebagai landasan pokok dalam hubungan antar negara. Oleh karena kondisi diatas merupakan suatu sistem yang telah mantap maka keadaan itu akan tetap demikian selama tidak ada kekuatan yang mampu untuk mengadakan perubahan.

Perkembangan fenomena keamanan internasional, menuntut adanya beberapa pendekatan atau konsep yang saling berpacu dewasa ini antara lain:

- a. Konsep *Balance of power*: berusaha untuk menjaga keseimbangan dengan kekuatan.

- b. Konsep perjuangan kelas: berusaha menghancurkan kapitalisme dengan segala cara.
- c. Konsep kerja mondial: yang berlandaskan idealisme dan bukan konsep kekuatan, berusaha mencapai dunia damai tanpa kekerasan.

*Balance of Power* lahir dari kandungan realis, dan kecenderungan sekarang negara liberal menganut teori ini. Setiap konsep keseimbangan pada dasarnya terletak pada equilibrium sekalipun sifat faktor equilibrium tersebut sangat berbeda satu sama lain (militer, hukum, budaya, kehidupan rakyat). Oleh karena itu, damai adalah jika terjadi suatu kondisi keseimbangan kekuatan dalam satu orde dunia yakni orde kapitalistik.

Dalam kaitan dengan pendekatan realis terhadap kondisi keamanan internasional, Jhon Hosack, mengatakan dalam keadaan tidak ada hukum, pemeliharaan kekuatan adalah satu-satunya jaminan keamanan. Organisasi dan hukum internasional dapat berjalan jika ada *balance of power*, tetapi selanjutnya organisasi dan hukum akan dapat mempengaruhi kontinuitas keseimbangan tersebut. Hal tersebut sangat jelas terlihat bagaimana cara pandang AS berperilaku di Timur Tengah, dan negara-negara di Afrika.

### 3. Konsep Keamanan

Keamanan merujuk pada suasana atau kondisi bebas dari bahaya, ketakutan, keresahan. *Liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risks or threats*. Keamanan Nasional: mengacu pada situasi atau keadaan dimana unsur pokok pembentuk suatu negara seperti, kedaulatan, wilayah, penduduk atau warga negara, basis ekonomi, pemerintah dan sistem konstitusi serta nilai-nilai hakiki yang dianutnya terjamin eksistensinya dan dapat menjalankan fungsi sesuai tujuannya tanpa gangguan atau ancaman dari pihak manapun. Keamanan internasional yaitu keamanan yang dilihat sebagai situasi dan kondisi yang ditentukan dalam interaksi aktor-aktor internasional.

Bagi realis, militer bagian penting dalam pendekatan keamanan, dalam mempertahankan kedaulatannya, oleh karena itu bagaimana dalam melihat peran dan fungsi militer, yakni:

- a. *Prestige Power*: suatu negara menunjukkan keunggulan militernya melalui penguasaan teknologi baru dengan daya penghancur yang dapat menggetarkan lawan.
- b. *Deterrent Power* (penangkal): meyakinkan lawannya tentang konsekuensi yang akan dihadapi bila melakukan suatu tindakan militer yang tidak dikehendaki.
- c. *Defensive*: melindungi diri dari kekuatan musuh.
- d. *Coersive Diplomacy*: menekan suatu negara agar mengikuti keinginan dari negara yang menekan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu.

Bagaimana pendekatan Keamananan dalam cara pandang Realis, bahwa obyek acuan keamanan adalah negara dan struktur sistem internasional bersifat anarkhis, sehingga dalam mengamankan kedaulatannya dengan cara

meningkatkan kemampuan militernya, dengan didukung kekuatan senjatanya atas dasar hitung-hitungan politik.

Sejalan dengan perkembangan konstelasi politik global, maka berpengaruh pada isu keamanan, seperti: *Humanitarian crisis*, HAM, *Failing States* (Somalia, Irak), Terorism dan Isu *Clash of Civilisation*, Konflik antar negara dan masalah WMD, Masalah *non traditional security issues*.

Kondisi ini akan sangat berpengaruh pada kebijakan politik global negara Amerika, sebagaimana akan dibahas pada bab selanjutnya. Terlepas dari adanya perkembangan isu keamanan, namun ada unsur-unsur yang tetap melekat dalam konsep keamanan, apa yang disebut sebagai elemen penting dalam konsep keamanan, yakni bahwa: Pertama, Keamanan bersifat produk dari kebijakan yang dihasilkan beragam actor (negara maupun non negara). Kedua, Keamanan merupakan interaksi interdependensi yang dihasilkan dari tataran lokal, nasional, regional dan global (multi sector). Keempat, Agenda keamanan juga bersifat majemuk.

#### **4. Doktrin Perang**

Adalah upaya untuk membedakan antara cara-cara yang dapat dibenarkan dengan yang tidak dapat dibenarkan dalam penggunaan angkatan bersenjata yang terorganisasi, terdiri dari:

##### **a. *Jus ad Bellum***

Yakni suatu doktrin kapan suatu pihak dapat dibenarkan dalam menggunakan angkatan bersenjatanya: Pertama, Alasan yang sah, perbandingan keadilan, proporsionalitas (kekerasan lebih kecil dari tujuan yang baik). Kedua, Kekuasaan yang sah, niat yang benar, probabilitas keadilan (senjata tak boleh sia-sia), upaya akhir.

##### **b. *Jus ini bello***

Adalah cara-cara apa yang harus dilakukan dalam menggunakan angkatan bersenjata seperti; tidak melakukan pengeboman daerah hunian warga sipil, melarang senjata pemusnah massal, prinsip proporsionalitas (kekuatan yang digunakan sesuai dengan kesalahan), prinsip pemilahan (diskriminatif) perang ditujukan pada pelaku tindakan yang salah bukan pada warga sipil yang terjebak, prinsip kekuatan minimum (jika kekuatan yang lebih sedikit sudah cukup untuk mencapai tujuan yang sama).

##### **c. *Jus post bellum* (Brian Orend)**

Mengatur bagaimana suatu peperangan dapat diakhiri dengan adil dan perjanjian perdamaian dapat dicapai, sementara penjahat perang juga diadili; Pertama, Pernyataan Umum dan Kekuasaan (perdamaian harus dibuat oleh kekuasaan yang sah). Kedua, Diskriminasi (Negara yang menang harus melakukan pembedaan antara para pemimpin politik dan militer, antara kombatan dan sipil). Ketiga, Proporsionalitas(syarat untuk penyerahan diri haruslah proporsional dengan hak-hak yang pertama-tama dilanggar).

#### **Doktrin Alternatif**



## **Realisme**

Realis skeptis tentang apakah konsep moral seperti keadilan dapat diharapkan pada perilaku dalam masalah internasional. Realisme, percaya bahwa konsep moral tidak boleh sekali-kali menjadi dasar atau membatasi perilaku suatu negara. Sebaliknya negara harus mengutamakan keamanan negara dan kepentingan dirinya. Sementara mereka yang terlibat dalam perang secara moral bertanggungjawab untuk membedakan antara tentara lawan dan warga sipil yang tidak berperang, adakalanya pembedaan itu tidak mungkin dilakukan. Dalam peperangan modern, proporsionalitas, seperti yang digambarkan dalam *jus in bello* bisa sulit dicapai, karena ada kecenderungan untuk menempatkan target militer di wilayah sipil.

### **5. Respon AS terhadap Terorisme, dalam pandangan Realisme**

Kalkulasi kebijakan: keamanan, pertahanan dan luar negeri AS berubah secara signifikan, yang mempengaruhi politik internasional, seperti:

- a. Sikap keras AS ingin melahirkan struktur bipolar (kekuatan good dan evil), menimbulkan dilematis negara pasca kolonial (antara memberantas teroris dan melawan pengganggu, kemiskinan, konflik etnis dengan melawan teroris tidak ingin dibawah orbit AS).
- b. AS lebih menghiraukan masalah terorisme daripada demokrasi dan HAM.
- c. Untuk mengantisipasi kemungkinan serangan teroris, AS mengadopsi doktrin *Preemption* (secara sepihak memberikan hak pada diri sendiri untuk mengambil tindakan lebih dulu untuk menghancurkan apa yang dipersepsikan terorisme)
- d. AS tampil sebagai negara adidaya tunggal yang sangat yakin bahwa pendekatan militer merupakan pendekatan terbaik dalam memenuhi dan melindungi keamanannya.

### **6. Kondisi Eskalasi Keamanan Dunia**

*Trend* keamanan dunia berputar pada 3 front:

1. Front Timur Tengah: masalah Irak akan menahan kaki AS dan menyedot anggaran dalam negerinya. Konflik jalur Gaza dengan menangnya Hamas memungkinkan batal damai dengan Israel. Dan masalah nuklir Iran akan menghadapkan AS dan Eropa pada dilematis, jika menghambat maka harga minyak tidak stabil, dan jika membiarkan maka Iran akan memproduksi senjata nuklir.
2. Front Asia Pasifik: Kebangkitan ekonomi China dan perang dinginnya dengan Jepang Taiwan, serta konflik semenanjung Korea dan kebangkitan ekonomi dan militer India.
3. Amerika Latin: dengan gerakan ekonomi alternatif (sosialisme abad 21) bukan menekankan anti imperialism, melainkan menentang ketidakadilan sistem ekonomi kapitalistik. Front Amerika Latin berpeluang untuk menentukan nasib imperium AS, mengingat sejarah Hitler akhirnya runtuh setelah Sekutu



membuka front baru di Eropa Timur. Disamping itu, kemenangan beberapa pemimpin Amerika Latin menjadi ancaman bagi AS, secara politik aliansi tersebut menuju konsolidasi yang sangat strategis, seperti penolakan ekonomi pasar bebas. Dukungan yang signifikan dari rakyat Amerika Latin (53,899 persen) terhadap Evo Morales di Bolivia, Nestor Kirchner di Argentina, Da Silvia di Brazil, Hugo Chaves di Venezuela, Tabar Vazquez di Uruguay adalah contoh nyata untuk itu.

## 7. Globalisasi dan Security

Gambaran globalisasi memperlihatkan gejala peningkatan perdagangan internasional, investasi, arus capital, kemajuan teknologi, meningkatnya institusi multilateral, melemahnya kedaulatan negara. Dimensi globalisasi militer: memperluas jaringan hubungan dan keterikatan militer dunia. Peningkatan inovasi teknologi militer, menyusun dunia kepada sebuah *single geostrategic space* (wilayah geostrategi tunggal).

### Globalisasi dan Ancaman Keamanan Negara:

- Globalisasi ekonomi: menipisnya kemampuan negara dalam hak-hak nasional ekonomi.
- Globalisasi Ideologi: membuka sekat identitas budaya, nilai-nilai bangsa, melemahkan semangat nasionalisme.
- Globalisasi Sosial: proses integrasi tidak terkendali, negara yang teknologinya tinggi mudah memberikan pengaruhnya.
- Globalisasi militer: Kerjasama militer mengancam kedaulatan dan otonomi kebebasan Negara dalam pengambilan keputusan secara institusional dan struktural. Dilema bagi keamanan nasional dalam pertahanan nasional atau bergabung melakukan *cooperative security*. Dilema keamanan dengan maraknya perdagangan senjata diseluruh dunia.

## 8. Konsep Super Power

Sebuah keadaan yang ditujukan bagi negara dengan kemampuan mempengaruhi kejadian dunia dan memproyeksikan *power* dalam skala yang super. *Super Power* mencakup beberapa hal: Pertama, Kebudayaan yang memiliki pengaruh yang kuat bagi negara lainnya atau memiliki soft power. Kedua, Ekonomi dan Keuangan: memiliki akses bahan baku, jumlah pasar dan produktivitas pasar domestik. Dan pemain utama pasar dunia atau dalam pasar keuangan global, serta tingkat inovasi dan kemampuan mengakumulasi modal/aset-aset. Ketiga, Demografis dimana jumlah penduduk besar, tingkat pendidikan maju, infra struktur memadai, kemampuan (ekonomi, budaya) mengembangkan daerah sekitarnya, pengembangan daerahnya dibawah kontrol langsung. Keempat, Militer dimana kemampuan militer menonjol, kemampuan untuk menghancurkan massif bagi negara lain, dan kapasitas proyek militer global. Kelima, Politik/Ideologi: sistem politik berjalan efektif, mampu memobilisasi bahan baku. Pengaruh ideologi dalam kehidupan masyarakat nasional/internasional.

### Bagaimana China?

1. Jumlah penduduk 1,3 M (dunia 6,4 M) Amerika 300 jt (2004).
2. GDP tumbuh 9 persen (7,124 M USD), mampu mengangkat kemiskinan 300 jt penduduknya.
3. Memiliki kekuatan nuklir, jumlah tentara terbesar di dunia (Amerika gudang nuklir terbesar kedua setelah Rusia).
4. Anggaran militer naik 2 kali lipat (48,4 M USD (Amerika 392,6 USD)
5. Memiliki pengaruh budaya yang kuat di Asia Tenggara (Amerika: pemain dominan dunia: mata uang, film, musik).
6. Mengirim beberapa kali astronot ke orbit bumi, tahun 2010 mengembangkan pesawat antariksa tanpa awak untuk mengorbit bulan disebut Chang e (Amerika mengirim manusia ke bulan).

Data tersebut menunjukkan bahwa predikat *super power* untuk China masih memerlukan waktu sejalan dengan peran-perannya di dunia internasional. Walaupun hari ini superior AS mulai tergugat, misalnya AS dan sekutunya tidak mampu membuktikan keberadaan WMD, pengangguran 6,2 persen, *devisit bugjed* 375 M, Uni Eropa mempertanyakan operasi gelap CIA di Eropa Timur, persoalan energi padamnya listrik bagian tenggara AS dan utara California (rugi milyaran dolar).

## 9. Teori Regionalisme

Teori *Regional Security* dianggap penting dalam pendekatan keamanan, karena; Pertama, Sebagai elemen pembentuk keamanan internasional ataupun konflik internasional. Kedua, Sangat berhubungan dan mempengaruhi keamanan nasional negara yang terletak didalam region yang bersangkutan (Uni Eropa dan ASEAN). Ketiga, berfungsi membantu dalam menganalisa keberlangsungan suatu kawasan, yakni melepaskan secara historis, mengapa suatu kawasan masih eksis dan kemungkinan upaya yang dapat dilakukan untuk melanggengkan kawasan tersebut.

Region diartikan sebagai sekumpulan negara dalam satu wilayah. Walaupun demikian, kedekatan geografis saja tidak cukup untuk menyatukan negara dalam satu kawasan. Hettne dan Soderbaun, mengemukakan, kedekatan geografis perlu didukung adanya kesamaan budaya, keterikatan sosial dan sejarah yang sama. Dalam hal ini Beeson, mengkritik teori fungsional, teori fungsional hanya memandang interaksi dan kerjasama antar negara yang menjadi faktor utama dalam menciptakan kawasan. Padahal, menurutnya, seharusnya aspek kesamaan identitas dan sistem sosial merupakan pendorong utama terbentuknya integrasi kawasan. Kelemahan teori fungsional tidak dapat menjelaskan bagaimana interaksi tersebut dapat tercipta pertama kali. Namun dalam kenyataannya teori fungsional terbukti berlaku di Eropa kini tumbuh menjadi kawasan yang berkembang yakni Uni Eropa.

Berdasarkan *new regional theory*, perkembangan regionalism tergantung pada 3 hal:





1. Dukungan dari *regional great power*.
2. Tingkat interaksi antar negara dalam kawasan
3. Saling kepercayaan antar negara dalam kawasan.

Hennet, membagi tingkatan regionalis kedalam 5 tahapan:

1. *Simple Geographic Unit of States*, kriterianya: Pertama, tidak ada kerjasama dan interaksi rutin antar negara di dalam kawasan. Kedua, kerjasama terjadi hanya ketika ada ancaman dan akan berakhir ketika ancaman sudah berakhir. Ketiga, sangat bergantung pada sumber daya pribadi, yakni pada masing-masing negara.
2. *Set of Social Interactions* Kriterianya adalah bahwa dalam suatu kawasan sudah tercipta interaksi antar negara namun hanya norma-norma institusi informal.
3. *Collective Defense Organisation*, Kriteria: Pertama, Negara mulai bersekutu dengan negara lain yang memiliki pemikiran yang sama didalam suatu kawasan untuk melawan ancaman musuh bersama. Kedua, ada perjanjian formal yang mengikat dan mengatur negara-negara dalam satu kawasan. Ketiga, ada kombinasi kekuatan meski bukan berupa penggabungan apalagi peleburan.
4. *Security Community*  
Kriterianya adalah; Pertama, interaksi antar masyarakat sipil antar negara sudah mulai dikembangkan. Kedua, terciptanya hubungan yang damai antar negara dalam kawasan. Ketiga, adanya kekuatan untuk memilih menggunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan masalah.
5. *Region State*  
Kondisi ini dicirikan pertama; Pertama, kawasan sudah memiliki identitas bersama yang berbeda dari kawasan lain. Kedua, kawasan memiliki kapabilitas bersama sebagai satu kawasan. Ketiga, kawasan memiliki legitimasi sebagai satu kesatuan.

## 10. Keamanan Regional dari Perspektif Realis

Realis memandang masalah keamanan regional tidak dapat disatukan meskipun mereka memiliki kepentingan yang sama. Hal ini membuat kerjasama diantara negara-negara dalam satu region sulit untuk dijalankan karena tidak adanya saling kepercayaan antar negara dalam kawasan. Realis, meyakini negara tidak boleh bergantung pada negara lain, sehingga *self-help* merupakan cara terbaik dalam mencapai stabilitas keamanan yang mandiri. Dengan adanya sistem *self-help* maka kooperasi antar negara dalam kawasan sulit untuk dibentuk. Integrasi kawasan tidak akan terwujud, bahkan ide kerjasama kawasan dan pemeliharaan keamanan regional secara bersama-sama merupakan hal yang tidak masuk akal. Salah satu kerjasama dan interaksi yang paling mungkin terjadi dikawasan adalah kerjasama untuk menangani musuh bersama dari luar kawasan, meski hal ini bukan jaminan bahwa negara-negara dalam kawasan dapat saling percaya untuk tergabung bersama melawan musuh dari luar kawasan.

## 11. Ancaman Terhadap Keamanan Regional

Ancaman merupakan dua sisi mata uang bagi terciptanya stabilitas kawasan. Ancaman dapat mengganggu kawasan regional, disisi lain ancaman justru dapat menciptakan kerjasama regional untuk menghilangkan ancaman tersebut. Ada 4 kategori yang dapat mengancam keamanan regional: Pertama, *Balance of Contest* yakni ancaman yang muncul karena adanya keinginan antara negara-negara di kawasan untuk menguasai aspek tertentu (sumber daya dan hegemoni) maka para aktor saling berlomba.

Kedua, *Grass Iire Conflicts* Yakni ancaman yang berupa konflik yang terjadi antar negara karena permasalahan lokal (politik, ekonomi, etnis) yang melibatkan issue di negara lain. Pada umumnya didorong oleh dua hal (yakni masalah pemicu, dan masalah mendasar yakni perebutan wilayah).

Ketiga, *Intra State Conflicts* Yakni ancaman regional yang berupa konflik internal di satu negara tertentu didalam kawasan tersebut. Meskipun demikian konflik tersebut memiliki potensi untuk mempengaruhi hubungan dengan negara lain yang memiliki hubungan tidak langsung terhadap konflik, misalnya konflik etnis minoritas di satu negara dimana etnis tersebut menjadi etnis mayoritas di negara lain. ( No.1 s/d 3 pendapat Hettne).

Keempat, *Transnational Threats* (pendapat Snyder) Yakni ancaman ini tidak berasal dari isu keamanan tradisional melainkan masalah lingkungan, ketidakadilan ekonomi, politik, sosial, kesehatan dan isu imigrasi. Tidak memerlukan penanganan secara militer, namun jika dibiarkan akan mengancam kawasan secara keseluruhan.

## **12. Stabilitas Keamanan Internasional dari Perspektif Marxis dan Neo Marxis**

Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah; Pertama, Dalam hubungan internasional proses penyatuan *human race* dalam satu dinamika kapitalisme dianggap sebagai *driving force* dalam tingkat interdependensi internasional. Kedua, Tentang konflik dan kerjasama, Marxisme lebih lebih berfokus pada aspek ekonomi dan materi, dan ekonomi lebih penting dibandingkan dengan persoalan yang lain sehingga dapat memfokuskan study pada upaya peningkatan kelas. Ketiga, Sistem internasional sebagai sistem kapitalis terintegrasi yang mengejar akumulasi modal. Keempat, Adanya sistem kapitalis akan mampu mengeliminir keberadaan kelas dan mampu mendominasi sistem internasional. Kelima, Adanya revolusi politik akan mampu menghapus sistem kapitalis dan akan digantikan oleh sistem sosialis. Keenam, Borjuis maupun proletar harus mampu kerjasama demi tercapainya perdamaian. Ketujuh, Perdamaian dan stabilitas keamanan internasional dapat ditegakkan dengan penghapusan kelas-kelas. Tidak dipungkiri bahwa system kapitalis yang ada saat ini hanya menguntungkan satu pihak saja yakni kaum kapitalis atau pemilik modal.

### **Neo Marxis**

Pada dasarnya masih menggunakan gagasan Marxis dalam usaha melepaskan manusia dari belenggu eksploitasi dan ketidaksetaraan. Asumsi-asumsinya tidaklah jauh berbeda dengan Marxis, hanya pada Neo Marxis lebih bersifat struktural, maka dalam melihat sistem internasional terbagi berdasarkan kelas (Immanuel Wallerstein):

1. *Core*, yakni negara yang dominan dalam dunia, sebagian besar adalah kaum kapitalis (AS dan Inggris).
2. *Semi-Periphery*, Negara dunia kedua dengan tingkat ekonomi cukup baik (India, China).
3. *Periphery*, Negara dunia ketiga (negara berkembang). sebagian besar di kawasan Asia, Amerika Selatan dan Afrika.

Neo Marxis, memberikan analisa bahwa kelas adalah sebagai aktor utama dalam hubungan internasional dan keadilan atau kesetaraan sebagai landasan terpenting. Adapun dalam pencapaian stabilitas dan perdamaian internasional tidak jauh berbeda dengan Marxis. Pencapaian perdamaian neo Marxis, yakni dengan cara kerjasama antar kelas-kelas sosial yang ada.

### Catatan (Realis)

Memang, seharusnya borjouis dan proletar dapat kerjasama demi terwujudnya perdamaian dan stabilitas keamanan internasional. Karena jika salah satu lebih mendominasi maka akan berpengaruh terhadap sistem perpolitikan internasional, tidak akan terjadi kesetaraan, keadilan serta kerjasama dalam mencapai stabilitas dan perdamaian.

Dan sejarah telah menunjukkan bahwa kelas yang ada sulit untuk ditingkatkan (seperti dari *periphery* meningkat menjadi *semi periphery* dan selanjutnya secara bersama-sama menjadi *Core*.) sehingga tetap ada kelas yang mendominasi, maka perdamaian dan stabilitas keamanan internasional sulit terwujud.

## PENUTUP

Kaum rationalist mengatakan “aku ada karena berpikir”, seorang Marxis, mengatakan “jika ingin hidup harus makan, jika ingin makan harus bekerja”, dan seorang realist, mengatakan, “hidup ini bukan sebagaimana yang kita pikirkan/inginkan (das sollen) melainkan sebagaimana yang kita alami/rasakan (das sein).” Dan hari ini fakta menunjukkan bahwa dunia diatur oleh PBB yang notabene didominasi oleh lima negara besar, yakni negara yang menang pada perang dunia II. Apa maknanya, kita boleh berandai-andai tentang doktrin-doktrin, baik atas nama moral, perdamaian, kesejahteraan, namun sejarah telah mengajari kita bahwa *power* adalah rujukan sekaligus sarana efektif untuk mencapai tujuan.

Machiavelli boleh dihujat (pemikir mengabaikan moral) namun semua orang akan mendambakan apa yang didambakan Machiavelli (kemegahan, kebesaran, kekuasaan). Thommas Hobbes, boleh diberi predikat pemikir primitive (homo homini lupus, otoritarianism) namun fakta sistem internasional hari ini dan selanjutnya adalah anarkhis, maka diperlukan *power* untuk mengaturnya, sehingga hukum adalah *power*.

## DAFTAR BACAAN

- Bantoro Bandoro, 2003, Masalah-Masalah Keamanan Internasional Abad 21 (Makalah), Dep. Kehakiman dan HAM, Denpasar.
- Ernesto Laclau and Chartal Mouffe, 2008, Hegemony and Socialist Strategy: Toward a Radical Democratic Politics, Resist Book (alih bahasa: Eko Prasetyo Darmawan)
- Firdaus Syam, 2006, Pemikiran Politik Barat, Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya terhadap Dunia Ke-3, Bumi Aksara, Jakarta.
- Linklater, Andrew, 2005, Theories of International Relations Third Edition: Marxism. New York: Palgrave Macmillan.
- Rizal Sukma, 2003, Keamanan Internasional Pasca 11 September: Terorisme, Hegemoni AS dan Implikasi Regional (Makalah) Dep. Kehakiman dan HAM RI, Denpasar.
- Sutopo Yuwono, 1998, Pengantar Dasar-dasar Strategi Nasional, Mabes ABRI Lemhannas, Jakarta.
- Theda Skocpol, 1991, States and Social Revolutions, A Comparative Analysis of France, Russia and China, Cambridge University (alih bahasa: Widjanarko S).
- Wallerstein, Immanuel, 1996, International Theory: Positivism and Beyond. Cambridge University Press.

